

KAJIAN
EFEKTIVITAS PELAKSANAAN
BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)
SEKOLAH MENENGAH ATAS
(Preliminary Study)



DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN
KEMENTERIAN KEUANGAN, 2015

DAFTAR ISI

BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Permasalahan.....	2
1.3. Tujuan.....	3
1.4. Manfaat.....	3
1.5. Ruang Lingkup dan Obyek Kajian.....	3
1.6. Sistematika.....	3
BAB 2 LANDASAN TEORI.....	5
2.1. Pengertian BOS Sekolah Menengah.....	5
2.2. Tujuan BOS SMA.....	5
2.3. Pemanfaatan Dana BOS SMA.....	6
2.4. Mekanisme dan Jadwal Penyaluran BOS.....	6
2.4.1. Penyaluran tahap I (Januari – Juni).....	6
2.4.2. Penyaluran tahap II (bulan Juli – Desember).....	7
2.5. Pihak yang terlibat dalam penyaluran BOS SMA.....	7
2.6. Definisi Efektivitas.....	9
2.7. Definisi Evaluasi.....	9
2.8. Penelitian Sebelumnya.....	9
BAB 3 METODE PENELITIAN.....	11
3.1. Pendekatan Penelitian.....	11
3.2. Jenis dan Sumber Data.....	11
3.3. Obyek dan Waktu Penelitian.....	12
3.4. Teknik Pengolahan dan Analisis Data.....	12
3.4.1. Teknik pengolahan data.....	12
3.4.2. Analisis data.....	12
3.5. Pelaksanaan Kegiatan.....	13
BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN.....	14
4.1. Profil Sekolah Obyek.....	14
4.2. Ketepatan Waktu Penyaluran Dana BOS.....	15
4.3. Kebijakan Keberpihakan BOS terhadap Siswa Miskin.....	18
BAB 5 KESIMPULAN DAN REKOMENDASI.....	21
5.1. Kesimpulan.....	21
5.2. Rekomendasi.....	21
DAFTAR PUSTAKA.....	23

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Alokasi dan Realisasi Anggaran BOS Sekolah Menengah	2
Tabel 3.1. Pelaksanaan Kegiatan Kajian	13
Tabel 4.1. Penyaluran dari Rekening Penampung ke Rekening Penerima	17
Tabel 4.2. Jenis Keringanan pada SMA Negeri 20 Kota Bandung	18
Tabel 4.3. Jenis Keringanan pada SMA PGRI 3 Kota Bandung	18
Tabel 4.4. Perbandingan Pemanfaatan BOS	19

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Mekanisme Penyaluran BOS SMA Tahap I (Januari-Juni)	2
Gambar 2.2. Mekanisme Penyaluran BOS SMA Tahap II (Juli-Desember)	2

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Para pendiri bangsa Indonesia telah mengamanahkan bahwa tujuan negara Indonesia di antaranya mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pendidikan. Banyak pihak yang berperan dalam menyukseskan tujuan ini, sebagaimana dipertegas dalam amandemen UUD 1945, bahwa peran bagi setiap warga negara wajib adalah mengikuti pendidikan dasar. Sedangkan pemerintah wajib membiayainya. Jenjang pendidikan dasar ini merupakan program pendidikan bagi warga negara berusia tujuh sampai 15 tahun melalui program wajib belajar sembilan tahun (Wajar 9 Tahun), meliputi jenjang pendidikan SD/ sederajat hingga SMP/ sederajat.

Program Wajar 9 Tahun yang digulirkan sejak Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional diundangkan telah mencapai target. Menurut data BPS, pada tahun 2003, APK SD/ sederajat sebesar 105,82%, meningkat hingga mencapai 107,71% pada tahun 2013. Untuk APK SMP/ sederajat sebesar 81,09% pada tahun 2003 dan sepuluh tahun kemudian sebesar 85,96%. Setelah pencapaian target tersebut, pemerintah melakukan perluasan program dengan nama Program Pendidikan Menengah Universal (PMU) dengan target APK untuk pendidikan menengah atau tingkat SMA/ sederajat pada tahun 2020 sebesar 97%. Sebagai gambaran pada tahun 2012/2013 APK pendidikan menengah (SMA/ sederajat) masih tertinggal diangka 78,7%.

Untuk mencapai target tersebut pemerintah berkewajiban untuk menyediakan akses seluas luasnya dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat termasuk lulusan SMP/ sederajat agar dapat melanjutkan ke sekolah pendidikan menengah. Salah satu perhatian pemerintah adalah meningkatkan kemampuan masyarakat untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang menengah (SMA/ sederajat). Untuk itu, pemerintah melaksanakan program BOS Sekolah Menengah (BOS SM).

BOS SM merupakan salah satu wujud perhatian pemerintah untuk membuka akses bagi masyarakat untuk melanjutkan sekolah ke jenjang pendidikan menengah, baik Sekolah Menengah Atas (SMA) maupun Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Adapun alokasi dana BOS SMA dan SMK pada Kemdikbud tahun 2013 – 2015 sebagai berikut:

Tabel 1.1: Alokasi dan Realisasi Anggaran BOS Sekolah Menengah
2013-2015

(dalam triliun rupiah)

URAIAN	2013		2014		2015
	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi	Pagu
BOS SMA	2,42	2,33	4,36	4,27	5,34
BOS SMK	2,33	2,31	4,31	4,31	5,26
JML	4,75	4,65	8,68	8,58	10,61

Secara umum tujuan BOS SM adalah untuk mewujudkan layanan pendidikan yang terjangkau dan bermutu bagi semua lapisan masyarakat dalam rangka mendukung program wajar 12 Tahun. Se jauh mana dana BOS dapat menopang kegiatan operasional sekolah dalam rangka mewujudkan program wajib belajar 12 tahun, tentu hal ini bergantung kepada kepatuhan sekolah dalam melaksanakan dana BOS yang telah diatur dalam petunjuk teknis BOS tahun 2015, baik dari tujuan maupun peruntukannya.

1.2. Rumusan Permasalahan

Pada dasarnya, BOS SM merupakan bagian dari skenario pendanaan pendidikan menengah seperti biaya investasi, operasional dan biaya pribadi peserta didik. BOS SM ini adalah bantuan pemerintah pusat yang ditujukan untuk membantu sekolah, baik negeri maupun swasta, dalam memenuhi biaya operasional sekolah khususnya non-personalia serta menjamin keberpihakan pemerintah bagi siswa miskin. Karena sifatnya bantuan, sekolah penerima BOS masih dapat melibatkan partisipasi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan operasional lainnya.

Dalam pencapaian tujuan tersebut, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah menerbitkan petunjuk teknis sebagai pedoman pelaksanaan BOS SMA. Pedoman ini mengatur antara lain tata cara dan waktu pencairan dana, pemanfaatan dana hingga pelaporan dana BOS. Pelaksanaan BOS SM akan menjadi efektif apabila dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam petunjuk teknis seperti ketepatan waktu penerimaan oleh sekolah sehingga dapat segera dimanfaatkan. Di samping itu, keberpihakan pemerintah bagi siswa miskin akan menjadi efektif apabila sekolah melaksanakan program tersebut.

Dari kondisi-kondisi tersebut dapat dirumuskan pertanyaan dalam kajian ini sebagai berikut:

- a. Apakah penyaluran BOS tepat waktu ?

- b. Apakah BOS mempunyai keberpihakan kepada siswa miskin?

1.3. Tujuan

Melalui kajian ini diharapkan dapat diperoleh gambaran mengenai efektivitas pelaksanaan BOS SMA dalam hal:

- a. Mengetahui ketepatan waktu penyaluran dana BOS.
- b. Mengetahui keberpihakan BOS terhadap siswa miskin.

1.4. Manfaat

Kajian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, yaitu:

- a. *Preliminary study* sehingga dapat menjadi bahan untuk pengkajian lebih lanjut; dan
- b. Menambah pengetahuan terutama terkait dengan BOS bagi pegawai Direktorat Anggaran II pada khususnya dan pegawai Ditjen Anggaran pada umumnya.

1.5. Ruang Lingkup dan Obyek Kajian

Kajian ini dilakukan hanya pada lingkup dana BOS SMA. Mengingat kajian BOS ini merupakan studi kasus pada sekolah tertentu, hasilnya tidak dapat digeneralisasi atau mewakili sekolah-sekolah yang menerima dana BOS.

Sedangkan obyek kajian yang dilakukan adalah kesesuaian antara pelaksanaan BOS terhadap buku petunjuk penggunaan BOS serta seberapa besar peran dana BOS dalam rangka membantu membiayai operasional sekolah. Sedangkan sekolah SMA yang dipilih dalam melakukan kajian ini adalah SMA Negeri 20 Kota Bandung (Eks RSBI) dan SMA PGRI 3 Kota Bandung.

1.6. Sistematika

BAB 1 Pendahuluan

Bab ini merupakan pengantar yang menjelaskan mengenai latar belakang, rumusan permasalahan, tujuan dan manfaat kajian, ruang lingkup dan obyek kajian serta sistematika

BAB 2 Landasan Teori

Dalam bab ini, diuraikan referensi kepustakaan yang digunakan seperti peraturan perundang-undangan yang dipedomani dalam penatakelolaan BOS, dan beberapa pengertian-pengertian terkait yang berhubungan dengan BOS, termasuk mekanisme penyaluran BOS SMA serta pihak-pihak yang terlibat.

Di samping itu, beberapa hasil penelitian yang terkait dengan BOS yang pernah dilakukan sebelumnya untuk membantu pemahaman dan analisis data walaupun metodologi yang digunakan berbeda.

BAB 3 Metode Penelitian

Bab ini akan menjelaskan langkah-langkah penyusunan kajian, seperti Jenis Penelitian, Obyek Penelitian, Jenis Data, Metode pengumpulan dan pengolahan data, serta penentuan informan sebagai narasumber dalam kajian ini.

BAB 4 Hasil dan Pembahasan

Dalam bab ini, diuraikan pemaparan hasil pengumpulan data termasuk profil obyek kajian dan hasil pengolahan kuesioner yang akan dibahas dengan menggunakan referensi sebelumnya. Pembahasan juga dilakukan terhadap kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan penyaluran BOS.

BAB 5 Kesimpulan dan Rekomendasi

Bab ini akan menyajikan kesimpulan terhadap permasalahan yang telah dibahas dalam bab-bab sebelumnya dan saran-saran yang dapat direkomendasikan.

BAB 2 LANDASAN TEORI

2.1. Pengertian BOS Sekolah Menengah

BOS adalah program pemerintah yang pada dasarnya adalah untuk penyediaan pendanaan biaya operasi non-personalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar. Biaya non personalia adalah biaya untuk bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan biaya tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak dll.

Sedangkan BOS Sekolah Menengah adalah program pemerintah sebagai rintisan program wajib belajar 12 tahun yang terjangkau dan bermutu. BOS disalurkan langsung ke SMA dan SMK, baik negeri maupun swasta untuk membantu biaya operasional non-personalia. Perhitungan besaran BOS SM yang diterima sekolah berdasarkan jumlah siswa dan satuan biaya bantuan.

BOS SM dimulai tahun 2013 dengan nama Rintisan BOS, dengan satuan biaya sebesar Rp60.000 per siswa per semester hingga pertengahan tahun 2013. Melalui APBN Perubahan 2013, Rintisan BOS menjadi BOS SM dengan satuan biaya sebesar Rp500.000 per siswa per semester. Satuan biaya tahun 2014 sebesar Rp1.000.000,-/tahun/siswa. Sedangkan pada tahun 2015 dan 2016, satuan biaya bertambah menjadi sebesar Rp1.200.000,-/tahun/siswa.

2.2. Tujuan BOS SMA

- a. Membantu biaya operasional non-personalia sekolah;
- b. Mengurangi angka putus sekolah SMA/SMK;
- c. Meningkatkan Angka Partisipasi Kasar (APK) siswa SMA/SMK;
- d. Mewujudkan keberpihakan pemerintah (*affirmative action*) bagi siswa miskin SMA/SMK dengan membebaskan (*fee waive*) dan/atau membantu (*discount fee*) tagihan biaya sekolah bagi siswa miskin;
- e. Memberikan kesempatan yang setara (*equal opportunity*) bagi siswa miskin SMA/SMK untuk mendapatkan layanan pendidikan yang terjangkau dan bermutu.
- f. Meningkatkan kualitas proses pembelajaran di sekolah.

2.3. Pemanfaatan Dana BOS SMA

BOS SM digunakan sekolah untuk membantu memenuhi kebutuhan biaya operasional non-personalia sekolah. Kebijakan pemanfaatan untuk SMA ada 14 *item* yang meliputi:

- a. Pengadaan alat tulis sekolah;
- b. Pengadaan alat habis pakai;
- c. Pengadaan bahan habis pakai;
- d. Pengadaan buku pelajaran/ buku penunjang pelajaran/ buku referensi;
- e. Pemeliharaan dan perbaikan ringan sarana/prasarana sekolah;
- f. Langganan daya dan jasa lainnya;
- g. Penyelenggaraan evaluasi pembelajaran;
- h. Penyelenggaraan kegiatan pembinaan siswa/ekstrakurikuler dan intrakurikuler;
- i. Kegiatan penerimaan siswa baru;
- j. Pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan;
- k. Pengelolaan data individual sekolah berbasis TI melalui aplikasi Dapodikmen 2015;
- l. Pengembangan *website* sekolah;
- m. Biaya asuransi keamanan dan keselamatan sekolah;
- n. Penyusunan dan pelaporan.

Selain mengatur penggunaan BOS, dalam buku petunjuk teknis BOS diatur juga bahwa sebagai wujud keberpihakan terhadap siswa miskin atas pengalokasian dana BOS SMA, sekolah diwajibkan untuk membebaskan (*fee wive*) dan/atau membantu (*discount fee*) siswa miskin dari kewajiban membayar iuran sekolah dan biaya-biaya untuk kegiatan ekstrakurikuler siswa. Bagi sekolah yang berada di kabupaten/kota yang menerapkan pendidikan gratis tidak diwajibkan memberikan pembebasan atau membantu siswa miskin.

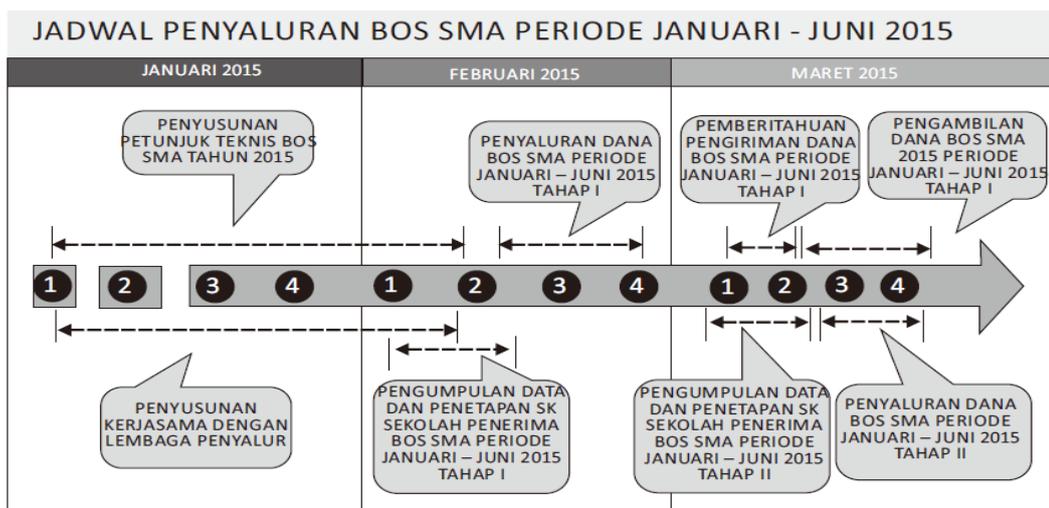
2.4. Mekanisme dan Jadwal Penyaluran BOS

Pada buku petunjuk teknis BOS 2015, pencairan BOS SMA diatur menjadi dua tahap. Tahap I periode Januari – Juni dan tahap II periode Juli – Desember 2015.

2.4.1. Penyaluran tahap I (Januari – Juni)

Data yang dipergunakan untuk penyaluran tahap I adalah data jumlah siswa tahun ajaran 2014/2015 yang telah di-*input* dalam aplikasi Dapodikmen. Penyaluran tahap I dilakukan bulan Februari dan Maret 2015.

Gambar 2.1 Mekanisme penyaluran BOS SMA tahap I (Januari – Juni)

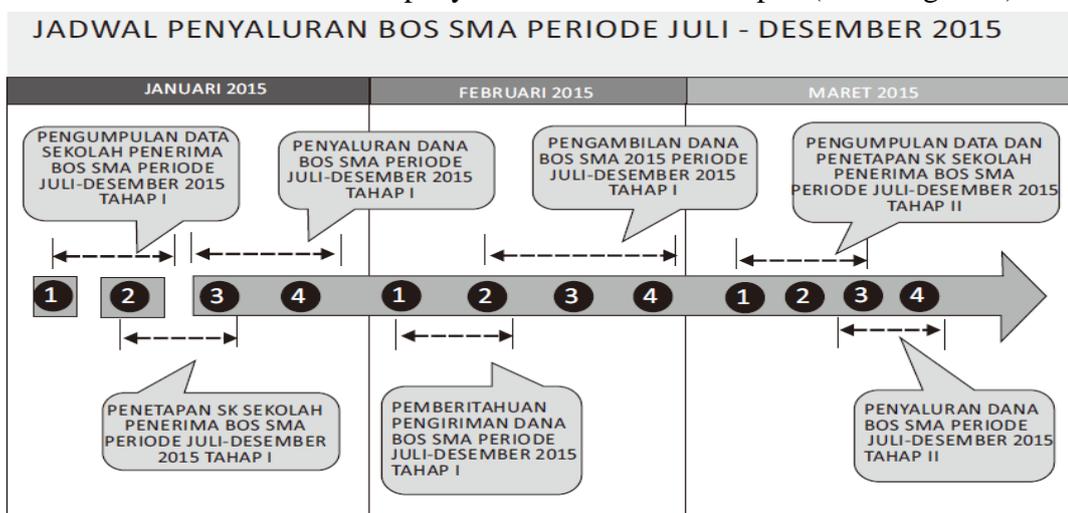


Penyaluran BOS tahap I periode Februari 2015 didasarkan pada data siswa yang sudah di-*input* pada aplikasi Dapodikmen per 31 Januari 2015 dan penyaluran periode bulan Maret didasarkan pada data siswa yang sudah di-*input* pada aplikasi Dapodikmen per 1 Maret 2015.

2.4.2. Penyaluran tahap II (bulan Juli – Desember)

Data yang dipergunakan untuk penyaluran tahap II adalah jumlah data siswa tahun ajaran 2015/2016 yang telah di-*input* dalam aplikasi Dapodikmen. Penyaluran tahap II dilakukan pada periode bulan Juli dan Agustus 2015.

Gambar 2.2 : Mekanisme penyaluran BOS SMA tahap II (Juli – Agustus)



... di-*input* pada aplikasi Dapodikmen per 1 Juli 2015 dan penyaluran periode bulan Agustus didasarkan pada data siswa yang sudah di-*input* pada aplikasi Dapodikmen per 31 Agustus 2015.

2.5. Pihak yang terlibat dalam penyaluran BOS SMA.

2.5.1. Direktorat SMA (sebagai pengelola tingkat pusat)

Direktorat SMA mempunyai peran menyusun buku petunjuk teknis, melakukan verifikasi/validasi data alokasi dana BOS, melakukan kerjasama dengan lembaga penyalur, menerbitkan SK, dan menyalurkan BOS, dan memberi tahu kepada dinas terkait bahwa telah disalurkan dana BOS.

2.5.2. Bank/Pos Penyalur

Bank / Pos Penyalur adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang jasa perbankan yang melakukan kegiatan penyaluran dana BOS SMA dengan tugas antara lain melakukan pemindahbukuan dana BOS SMA dari rekening penyalur ke rekening sekolah selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kalender sejak dana ditransfer dari Kas Umum Negara ke Rekening Penyalur tanpa ada potongan atau biaya apapun dan memberitahukan ke sekolah penerima BOS SMA melalui kantor cabang bahwa dana BOS SMA sudah dipindahbukukan ke rekening sekolah.

2.5.3. KPPN

Peranan KPPN adalah memproses SPM yang diajukan oleh Direktorat SMA dan menyalurkan dana dari kas umum negara ke rekening penampungan pada lembaga penyalur dengan menerbitkan SP2D.

2.5.4. Dinas Pendidikan

Dinas pendidikan yang terlibat adalah Dinas Pendidikan Provinsi dan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota. Dinas Pendidikan Provinsi mempunyai peran yaitu meriviu dan menyetujui RAB BOS dan melakukan verifikasi dan validasi individual sekolah. Sedangkan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota mempunyai peran berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi dalam pelaksanaan verifikasi dan validasi individual.

2.5.5. Sekolah

Sekolah mempunyai tugas antara lain:

- Melakukan entri data melalui aplikasi dapodikmen 2015 termasuk melaporkan jumlah data siswa sesuai dengan kondisi riil sekolah;
- Mengisi dan mengirimkan data jumlah siswa ke dinas pendidikan provinsidan/atau kabupaten/kota.
- Menyusun RKJM, RKT, RKAS dan RAB BOS untuk pengalokasian dana BOS SMA; Memastikan entri data ke aplikasi dapodikmen 2015 telah dilakukan dengan baik.
- Menandatangani Pakta Integritas dan Surat Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM-bermeterai).

2.6. Definisi Efektivitas

Efektivitas menurut *oxforddictionaries.com* adalah derajat tingkat pencapaian atas hasil yang diinginkan (*the degree to which something is successful in producing a desired result*). Sedangkan kaitannya dengan efektivitas biaya (*cost-effectiveness*), Woodhall dalam Sembiring, mendefinisikan analisis keefektivitasan biaya sebagai teknik analisis untuk mengukur hubungan antara input atau biaya suatu proyek/kegiatan dengan hasil/output tertentu. Analisis efektivitas biaya berbeda dengan analisis manfaat biaya (*cost benefit analysis/CBA*), CBA mengukur biaya dan manfaat suatu proyek/kegiatan dalam satuan uang yang dideskripsikan dalam tingkat pengembalian (*rate of return*).

2.7. Definisi Evaluasi

Evaluasi (Bruce W. Tuckman dalam Balitbang Medan) merupakan aktivitas untuk mengetahui/menguji apakah suatu kegiatan, proses (*process*) kegiatan, keluaran (*output*) suatu program telah sesuai dengan tujuan atau kriteria yang telah ditentukan. Definisi evaluasi lebih dipertajam lagi dengan batasan sebagai proses memberikan atau menentukan nilai kepada objek tertentu berdasarkan suatu kriteria tertentu (Sudjana dalam Balitbang Medan). Memperhatikan batasan-batasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa evaluasi secara umum dapat diartikan sebagai proses sistematis untuk menentukan nilai sesuatu (tujuan, kegiatan, keputusan, proses, orang, maupun objek) berdasarkan kriteria tertentu.

2.8. Penelitian Sebelumnya

No	Nama dan Tahun Penelitian	Hasil Penelitian
1	I Wayan Cenik, A.A. Gede Agung, I Made Yudana, 2010	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas program BOS SMA di SMA Negeri Kabupaten Karangasem dalam rangka mendukung Pendidikan Menengah Universal, yang dilakukan melalui studi evaluasi terhadap komponen konteks, input, proses dan produk. Berdasarkan hasil temuan ini disimpulkan bahwa pelaksanaan program BOS SMA di SMA Negeri Kabupaten Karangasem dalam rangka mendukung Pendidikan Menengah Universal tergolong cukup efektif. Namun demikian masih diperlukan perbaikan-perbaikan.
	Ni Wayan Parwati Asih, I Made Yudana, I Gusti Ketut Arya Sunu	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Efektivitas Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada SMK Teknologi Nasional Denpasar dilihat dari variabel Context, Input, Process, dan Product. Secara umum Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMK Teknologi Nasional Denpasar tergolong efektif. Meskipun tergolong efektif namun terdapat kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program BOS . Untuk itu disarankan: (1) peningkatan pemahaman terhadap kebijakan terkait BOS, tujuan

		program BOS, (2) peningkatan sumber daya manusia, sosialisasi/pelatihan, organisasi/ manajemen, dan dana operasional, (3) perencanaan program secara matang, penyaluran dana harus tepat waktu, pemanfaatan dana pada kebutuhan riil, monitoring dan evaluasi dilakukan secara objektif dan berkesinambungan, (4) program peningkatan prestasi akademik dan non akademik siswa dirancang sebaik-baiknya
--	--	---

BAB 3 METODE PENELITIAN

3.1. Pendekatan Penelitian

Kajian efektivitas dana BOS di sini merupakan jenis penelitian eksploratif untuk melihat apakah penyaluran dan pemanfaatan BOS telah dilaksanakan sesuai dengan buku petunjuk teknis BOS 2015.

Secara metodologis, penelitian ini termasuk penelitian evaluasi kualitatif dan lebih bersifat deskriptif dimana peneliti adalah instrumen kunci. Pendekatan kualitatif merupakan pendekatan yang sangat relevan untuk meneliti fenomena yang terjadi dalam suatu masyarakat, karena pengamatan diarahkan pada latar belakang dan individu secara holistik dan memandangnya sebagai bagian dari suatu keutuhan, bukan berdasarkan pada variabel atau hipotesis sehingga melalui pendekatan kualitatif penelitian yang dilakukan dapat memperoleh informasi yang lebih detail mengenai kondisi, situasi dan peristiwa yang terjadi (Lexy Maleong, *Metodologi penelitian kualitatif*, Bandung, 2003, hal.3).

Hal ini sejalan dengan pendapat Kirl dan Miller yang menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah:

"Tradisi tertentu dalam ilmu sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan pada manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang – orang tersebut dalam bahasa dan peristilahannya. Jadi alat pengumpul data dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri sebagaimana instrumen kunci"

3.2. Jenis dan Sumber Data

Jenis data dalam kajian ini adalah data primer dibantu dengan data sekunder untuk memperkuat analisis kualitatif. Sumber data primer diperoleh melalui:

- a. Metode kuesioner, yaitu memperoleh dan mengumpulkan data dengan mengirimkan suatu daftar pertanyaan/ pernyataan-kepada responden (Agung, 2014:99). Tujuan mengirimkan kuesioner adalah mencari informasi yang lengkap mengenai suatu masalah dan responden tidak merasa khawatir bila responden memberikan jawaban pada kuesioner.
- b. Metode wawancara, yaitu metode pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab yang sistematis pada suatu pokok persoalan tertentu sesuai dengan tujuan penelitian yang telah dirumuskan sebelumnya (Agung, 2014:106). Menurut Mardalis (2010:64) Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk mendapatkan keterangan-

keterangan lisan maupun bercakap-cakap dan berhadapan muka dengan orang yang dapat memberikan keterangan kepada peneliti.

Sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan.

3.3. Obyek dan Waktu Penelitian

Objek kajian dilakukan pada SMA Negeri 20 Kota Bandung dan SMA PGRI 3 Kota Bandung. Dasar pengambilan objek kajian di Kota Bandung karena SMA di Kota Bandung belum menerapkan kebijakan sekolah gratis untuk sekolah menengah, sehingga bisa melihat keterkaitan BOS dengan siswa miskin. Sedangkan memilih SMA Negeri 20 Kota Bandung dan SMA PGRI 3 Kota Bandung dikaitkan dengan sekolah “bagus” dan yang “tidak bagus”. Oleh karena kriteria sekolah “bagus” dan “tidak bagus” tidak bisa secara mutlak didefinisikan karena banyak faktor yang menjadi tolok ukur, maka dasar dari penentuan sekolah adalah sebagai berikut:

- a. Mewakili sekolah yang secara umum di mata masyarakat merupakan sekolah favorit atau tidak;
- b. Status sekolah harus mewakili negeri dan swasta.
- c. Jumlah siswa;
- d. Bukan merupakan sekolah gratis.

Berdasarkan kriteria-kriteria di atas, maka dipilih SMA Negeri 20 dan SMA PGRI 3 Kota Bandung. Kriteria tersebut diharapkan dapat melihat perilaku sekolah terhadap pengelolaan dana BOS yang diterima. SMA Negeri 20 Kota Bandung merupakan sekolah favorit/eks RSBI dengan jumlah siswa sebanyak 983 siswa dan berstatus sekolah negeri. Sedangkan SMA PGRI 3 Kota Bandung merupakan sekolah swasta dengan jumlah siswa sebanyak 465 siswa.

Waktu penelitian dilakukan dari tanggal 15 sampai tanggal 17 September 2015 di Kota Bandung, Jawa Barat.

3.4. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

3.4.1. Teknik pengolahan data

Teknik pengolahan data yang dipergunakan untuk pengkajian ini adalah teknik pengolahan data kualitatif dilakukan dengan deskriptif analitis untuk data yang bersifat kualitatif.

3.4.2. Analisis data

Pendekatan kualitatif yang digunakan peneliti untuk menggali informasi dari responden sangat membantu untuk menganalisis apakah pelaksanaan sesuai dengan pedoman

pelaksanaan BOS, baik dari sisi tujuan maupun *item-item* pengeluaran yang harus dibiayai dari BOS.

Setelah data terkumpul peneliti dapat mulai mengorganisasi, dan mengklasifikasi data. Data diklasifikasikan sesuai dengan topik yang kemungkinan dapat dianalisis untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan BOS. Analisis data dilakukan sejak peneliti di lapangan, sewaktu pengumpulan data dan setelah semua data terkumpul atau setelah selesai.

Untuk melihat efektif atau tidaknya penyaluran dan penggunaan BOS dilakukan pendekatan yang sederhana, yaitu: apakah sesuai dengan petunjuk yang telah ditetapkan oleh penanggung jawab program terkait dengan ketepatan waktu pencairan dana dan keberpihakan bagi siswa miskin.

3.5. Pelaksanaan Kegiatan

Tabel 3.1 : Pelaksanaan Kegiatan Kajian

No	Uraian Kegiatan	Agustus				September				Oktober			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Penyusunan instrumen			■	■								
2	Validasi instrumen dengan Kepala sekolah				■								
3	Koordinasi dengan Kemdikbud					■							
4	Pengumpulan data ke sekolah					■	■						
5	Penabulasi dan Analisis Data							■	■				
6	Penyusunan konsep laporan										■	■	
7	Pemaparan dan penyusunan laporan akhir												■
8	Penggandaan laporan												■

BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Profil Sekolah Obyek

Kota Bandung merupakan ibu kota provinsi Jawa Barat. Kota ini terletak 140 Km sebelah tenggara Jakarta. Menurut jumlah penduduk, Bandung memiliki urutan ketiga terbesar di Indonesia setelah Jakarta dan Surabaya. Menurut data BPS (bandungkota.bps.go.id), jumlah penduduk Kota Bandung pada 2014 sebanyak 2.470.802 jiwa dengan jumlah laki-laki sebanyak 1.248.478 jiwa dan perempuan sebanyak 1.222.324 jiwa.

Dalam bidang pendidikan, Kota Bandung memiliki jumlah SMA/MA/SMK sebanyak 289 dengan komposisi 45 sekolah negeri dan 244 sekolah swasta. Menurut Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) 2014 dari Dinas Pendidikan Kota Bandung, APM usia sekolah menengah sederajat pada tahun 2014 sebesar 78,37%. Jumlah penduduk berusia 16-18 tahun sebesar 121.534 orang, sedangkan jumlah siswa sekolah menengah sederajat yang berusia 16-18 tahun sebanyak 95.246 orang. Jumlah APM Kota Bandung masih lebih besar 7,23% dibandingkan APM Nasional yang berada pada jumlah 71,60%. Untuk angka partisipasi kasar Kota Bandung mencapai angka 100,90%.

4.1.1. SMA PGRI 3 Kota Bandung

Sekolah Menengah Atas(SMA) PGRI 3 Kota Bandung merupakan salah satu institusi pendidikan swasta di bawah Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan Dasar dan Menengah (YPLP Dikdasmen) PGRI Kota Bandung. Saat ini, sekolah ini telah memperoleh akreditasi A.

SMA PGRI 3 Kota Bandung berlokasi di Jalan A.H. Nasution – Sukup Nomor 15, Kelurahan Cigending, Kecamatan Ujung Berung Bandung. Pada tahun ajaran 2015/2016, jumlah peserta didik sebanyak 465 siswa dengan komposisi laki-laki 193 siswa dan perempuan 272 siswa. Dari jumlah tersebut, sebanyak 132 siswa merupakan siswa miskin yang memerlukan perhatian. Iuran per siswa per bulan pada sekolah ini sebesar Rp180.000, khusus untuk siswa miskin mendapatkan kebijakan tersendiri.

Sedangkan jumlah guru pada SMA PGRI 3 Kota Bandung sebanyak 33 orang. Dari jumlah tersebut hanya satu orang yang PNS, sedangkan sebanyak 32 merupakan guru Non PNS. Perbandingan atau rasio siswa terhadap guru pada SMA PGRI 3 Kota Bandung adalah 1:14,

berdasarkan PP No.74 tahun 2008 tentang Guru, rasio siswa terhadap guru yang mendapatkan tunjangan profesi untuk SMA adalah 20:1.

4.1.2. SMA Negeri 20 Kota Bandung

SMA Negeri 20 Kota Bandung merupakan sekolah eks RSBI dengan akreditasi A. Walaupun RSBI sudah dihapus, namun persepsi masyarakat terhadap sekolah eks RSBI tetap sebagai sekolah yang mempunyai kualitas bagus.

SMA Negeri 20 Kota Bandung menempati gedung cagar budaya yang terletak di Jalan Citarum No.23 Kota Bandung, Jawa Barat. Sekolah SMA Negeri 20 Kota Bandung berdiri pada tahun 1986 sesuai dengan Surat Keputusan Kakanwil Depdikbud Provinsi Jawa Barat No.663/IO/R/87.

SMA Negeri 20 Kota Bandung mempunyai siswa tahun ajaran 2015/2016 sebanyak 983 siswa dengan komposisi laki-laki sebanyak 442 siswa dan 541 siswa perempuan. Dari jumlah tersebut, sebanyak 154 siswa merupakan siswa miskin yang memerlukan perhatian. Iuran per siswa per bulan pada sekolah ini sebesar Rp300.000, khusus untuk siswa miskin mendapatkan kebijakan tersendiri. *Passing grade* untuk masuk pada sekolah ini di tahun 2015 untuk pendaftar dalam kota 28,65 dan untuk luar kota 35,45 (empat mata pelajaran).

Sedangkan jumlah guru pada SMA Negeri 20 Kota Bandung sebanyak 63 guru. Dari jumlah tersebut sebanyak 54 merupakan PNS dan sebanyak 9 Non PNS. Rasio siswa dan guru adalah 16:1. berdasarkan PP No.74 tahun 2008 tentang Guru, rasio siswa terhadap guru yang mendapatkan tunjangan profesi untuk SMA adalah 20:1. Rasio ini terkait dengan pemberian tunjangan profesi.

4.2. Ketepatan waktu penyaluran dana BOS

Berdasarkan wawancara dengan pihak sekolah, penyaluran BOS yang ideal adalah pada bulan Januari untuk semester I hal ini karena sejak bulan Januari sekolah sudah harus mengeluarkan biaya operasional. Sedangkan untuk semester II pada bulan Juli hal ini karena bertepatan dengan penerimaan siswa baru yang memerlukan banyak biaya.

Dalam penelitian ini yang dijadikan dasar acuan ketepatan waktu atau efektivitas adalah yang diatur dalam buku petunjuk teknis BOS SMA tahun 2015, yaitu dana BOS disalurkan ke sekolah dua kali dalam setahun per enam bulan/semester. Namun untuk tahun 2015 penyaluran pada tiap semester dilakukan masing-masing dua kali, yaitu untuk semester I (Januari – Juni) disalurkan pada bulan Februari dan Maret 2015 sedangkan semester II (Juli – Desember) disalurkan pada bulan Juli dan Agustus 2015.

Berdasarkan hasil penelitian (wawancara dengan kepala sekolah) pencairan BOS semester I (periode Januari – Juni) disalurkan dalam tiga tahap, yaitu tanggal 2 Maret 2015, 13 April 2015; dan 1 Juni 2015. Sedangkan untuk semester II tidak termasuk dalam penelitian karena pada saat penelitian pencairan BOS semester II masih dalam proses, namun dari aspek waktu kemungkinan besar terjadi keterlambatan pencairan sebagaimana semester I.

Berdasarkan hasil kuesioner, terdapat perbedaan jawaban antara SMA Negeri 20 dengan SMA PGRI 3. SMA Negeri 20 menjawab tidak tepat waktu sedangkan SMA PGRI 3 menjawab tepat waktu. Perbedaan tersebut bisa jadi karena adanya perbedaan persepsi. Namun demikian, kalau dilihat dengan jadwal yang diatur dalam buku Juknis BOS SMA 2015 pencairan dana BOS tidak tepat waktu. Untuk periode pertama seharusnya dibayarkan pada bulan Februari 2015 dan periode kedua pada bulan Maret 2015.

Untuk mengetahui keterlambatan tersebut peneliti mencoba untuk membandingkan jadwal pencairan dana BOS semester I sebagaimana diatur dalam buku juknis BOS SMA 2015:

a. Pembuatan buku juknis BOS SMA 2015;

Berdasarkan jadwal, buku juknis harus mulai disusun bulan Januari dan harus selesai minggu pertama bulan Februari 2015. Berdasarkan fakta hasil penelitian, buku juknis BOS SMA 2015 telah selesai dibuat pada bulan Februari 2015 namun tidak diketahui pada minggu keberapa.

b. Penyusunan perjanjian kerja sama antara Direktorat SMA dengan Bank penyalur (BNI);

Pembuatan perjanjian kerjasama (MoU) antara Direktorat SMA dengan Bank penyalur (BNI) harus selesai pada minggu pertama bulan Februari. Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, MoU baru selesai dibuat pada tanggal 12 Februari 2015. Itu berarti terlambat satu minggu dari jadwal.

c. Pengumpulan data dan penetapan SK penerima BOS;

Pengumpulan data dan penerbitan SK harus selesai minggu kedua bulan Februari untuk periode pertama dan minggu kedua bulan Maret untuk pembayaran periode kedua. Berdasarkan wawancara dengan pihak sekolah dan Direktorat SMA, terdapat kendala dalam pengisian data siswa melalui aplikasi dapodikmen hal ini karena hanya siswa yang sudah mempunyai Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) yang boleh di-*input* sehingga terjadi keterlambatan peng-*input*-an data. Untuk menyasati ini dibuat SK bertahap sesuai data yang masuk dalam *database* dapodikmen, sehingga penyaluran BOS semester I terjadi keterlambatan. Keterlambatan *input* data juga disebabkan karena masih ada operator di sekolah yang kurang memahami dalam pengisian Dapodikmen. Sebagai

tambahan informasi, bahwa sistem Dapodikmen baru berjalan 2 tahun, sedangkan sistem Dapodikdas sudah berjalan sekitar 5 tahunan.

d. Penyaluran dana BOS.

Penyaluran BOS ke rekening penerima sesuai jadwal seharusnya minggu ketiga dan keempat bulan Februari untuk periode pertama dan minggu ketiga dan keempat bulan Maret untuk periode kedua. Berdasarkan penelitian, Direktorat SMA mencairkan dana dari KPPN untuk ditransfer rekening penampung (belum ke rekening penerima) sebanyak lima kali, yaitu tanggal 18 Februari, 25 Februari, 1 April, 18 Mei, dan 22 Juni 2015. Dari data ini dapat dilihat terjadi keterlambatan pencairan dana BOS, berdasarkan wawancara dengan pihak Direktorat Pembinaan SMA dan kepala sekolah hal ini karena adanya keterlambatan peng-*input*-an data siswa ke aplikasi Dapodikmen.

Keterlambatan juga terjadi pada proses penyaluran dari rekening penampung ke rekening penerima (sekolah), berdasarkan MoU antara Direktorat Pembinaan SMA dengan Bank penyalur, bank penyalur paling lambat 10 hari kalender sejak kas masuk ke rekening Kas Negara. Berdasarkan dari data yang ada, keterlambatan ini disebabkan karena adanya keterlambatan penerbitan Surat Perintah Pemindahbukuan (SPPb) dari Direktorat Pembinaan SMA ke Bank penyalur.

Untuk lebih jelas dapat dilihat Tabel 4.1 Penyaluran dari Rekening Penampung ke Rekening Penerima.

Tabel 4.1 : Penyaluran dari Rekening Penampung ke Rekening Penerima

No.	Pencairan ke rekening penampung*)	Surat Perintah Pemindahbukuan (SPPb)	Pencairan ke rekening penerima**)	Waktu transfer ke rekening penerima
1.	18 Februari 2015	26 Februari 2015	2 Maret 2015	Lebih dari 10 hari
2.	1 April 2015	8 April 2015	13 April 2015	Lebih dari 10 hari
3.	18 Mei 2015	18 Mei 2015	1 Juni 2015	Lebih dari 10 hari

*) sumber BI-DJA setelah dikonfirmasi ke Direktorat Pembinaan SMA

***) sumber hasil wawancara dengan kepala sekolah

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa terjadi keterlambatan penyaluran BOS, baik dari Kas Negara ke rekening penampung maupun dari rekening penampung ke rekening sekolah.

Berdasarkan hasil penelitian dan data di atas, secara umum terdapat keterlambatan dalam setiap tahapan penyaluran BOS, namun yang lebih mempengaruhi keterlambatan

penyaluran ke rekening penerima adalah terkait dengan pendataan/*input* data siswa dan penyaluran dari rekening penampung ke rekening penerima (sekolah).

Keterlambatan penyaluran BOS pada SMA Negeri 20 dan SMA PGRI 3 Kota Bandung tidak ada dampak langsung terhadap kegiatan proses belajar mengajar karena bagaimanapun proses belajar mengajar harus tetap berjalan, kalau berhenti maka akan tertinggal dan tidak dapat mengikuti jadwal belajar yang ditetapkan pemerintah.

Namun demikian, berdasarkan wawancara dengan kepala sekolah, dampak dari penyaluran BOS adalah kesulitan dalam pengadministrasian (*governance*) karena sekolah harus berhutang atau meminjam uang, baik dari koperasi, komite sekolah, atau sumber lainnya untuk keperluan sekolah sehingga berpotensi menimbulkan kesalahan pengadministrasian, penyusunan laporan dan potensi kekeliruan penggunaan dana BOS. Apalagi laporan BOS semester I harus selesai bulan Juni 2015 sedangkan dana BOS baru cair tanggal 1 Juni 2015.

4.3. Kebijakan Keberpihakan BOS Terhadap Siswa Miskin

Berdasarkan kebijakan Kemdikbud, bahwa BOS bagian dari upaya pelaksanaan program wajar 12 tahun, dimana anak-anak usia 7 s.d. 18 tahun harus mendapat akses sekolah sampai lulus sekolah menengah. Salah satu kendala yang dihadapi oleh pemerintah selain dari penyediaan sarana dan prasarana adalah anak dari golongan masyarakat kurang mampu yang tidak dapat melanjutkan sekolah pada jenjang pendidikan menengah.

Selain program Kartu Indonesia Pintar (yang sebelumnya BSM) dana BOS diharapkan juga dapat membantu masyarakat miskin bisa bersekolah di sekolah menengah dengan biaya yang ringan bahkan gratis. KIP adalah bantuan untuk biaya keperluan siswa, sedangkan BOS biaya untuk operasional sekolahnya.

Dalam buku petunjuk penggunaan dana BOS sekolah wajib menerapkan *fee waive*, yaitu memberikan keringanan biaya kepada siswa miskin sampai dengan 100% atau gratis dan/atau *discount fee*, yaitu keringanan biaya sekolah kepada siswa miskin dengan besaran tertentu. Kebijakan ini diatur dalam buku juknis BOS SMA 2015 dan sifatnya wajib bagi sekolah yang berada di kab/kota yang belum menerapkan sekolah gratis.

Terkait kebijakan ini SMA Negeri 20 maupun SMA PGRI 3 telah menerapkan keberpihakan kepada siswa miskin. Pada SMA Negeri 20 Kota Bandung ada 154 siswa miskin yang tidak dipungut biaya (*fee waive*) dimana biaya sekolah yang harus mereka bayar ditanggung oleh dana BOS. Jadi benefit yang diterima tiap siswa adalah sebesar Rp7.659.740,00/siswa/ tahun (Rp1.179.600.000,00/154).

Tabel 4.2 : Jenis Keringanan pada SMA Negeri 20

No.	Jenis Keringanan	Persentase Keringanan	Jumlah Siswa	Benefit yang Diterima Siswa
1.	Bebas biaya pendidikan (<i>Fee Waive</i>)	100%	154	Rp1.179.600.000
2.	Potongan biaya pendidikan (<i>Discount Fee</i>)	-	-	-

Sumber : diolah

Jika dibandingkan dengan jumlah keseluruhan siswa pada SMA Negeri 20 sebanyak 983 siswa, maka penerima manfaat/benefit keringanan ini sebesar 15,67%.

Sedangkan SMA PGRI 3 Kota Bandung memiliki kebijakan tersendiri dalam menerapkan keberpihakan kepada siswa miskin. Pemberian benefit tidak hanya berupa *fee waive*, melainkan *discount fee* juga. Siswa miskin yang digratiskan hanya sebanyak 60 siswa miskin yang gratis (*fee waive*), sisanya sebanyak 240 hanya mendapatkan keringanan biaya (*discount fee*) antara 25% s.d.75% sebagaimana dalam Tabel 4.3. Kendala terbesar disebabkan dana BOS yang diterima tidak besar mengingat jumlah siswa yang diterima pun tidak banyak. Padahal sekolah tersebut banyak siswa yang berasal dari keluarga kurang mampu. Hal ini berbanding terbalik dengan SMA N 20 Kota Bandung yang siswa miskinnya sedikit tetapi dana BOS-nya besar.

Tabel 4.3 : Jenis Keringanan pada SMA PGRI 3

No.	Jenis Keringanan	Persentase Keringanan	Jumlah Siswa	Benefit yang Diterima Siswa
1.	Bebas biaya pendidikan (<i>Fee Waive</i>)	100%	60	Rp108.000.000
2.	Potongan biaya pendidikan (<i>Discount Fee</i>)	75%	150	Rp202.500.000
3.	Potongan biaya pendidikan (<i>Discount Fee</i>)	50%	60	Rp54.000.000
4.	Potongan biaya pendidikan (<i>Discount Fee</i>)	25%	30	Rp13.500.000
	JUMLAH		300	Rp378.000.000

Sumber : diolah

Dari data di atas dapat dilihat bahwa SMA PGRI 3 Kota Bandung tidak bisa memberikan pembebasan kepada semua siswa miskin, masih terdapat beberapa siswa miskin yang dipungut biaya walaupun dengan pemberian *discount fee*. Namun demikian, jumlah siswa miskin yang menerima benefit jauh lebih besar dibandingkan SMA Negeri 20, yaitu mencapai 64,52% dari jumlah keseluruhan SMA PGRI 3 sebesar 465 siswa.

Kebijakan pemberian diskon pada SMA PGRI 3 ternyata mampu memperluas cakupan. Namun bukan berarti tanpa masalah. Ada potensi siswa miskin yang “hanya” mendapatkan

keringanan berupa *discount fee*, tidak mampu membayar uang SPP dikemudian hari sehingga memungkinkan *drop-out*.

Perbedaan jumlah siswa miskin dan jumlah dana BOS yang diterima sekolah mempengaruhi kebijakan sekolah terhadap siswa miskin, namun demikian kedua sekolah tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam buku juknis BOS SMA 2015 dalam hal keberpihakan terhadap siswa miskin.

Secara umum kategori siswa miskin berdasarkan hasil kuesioner sebagai berikut:

- a. Siswa dengan tingkat kemampuan ekonomi orang tuanya paling rendah di sekolah;
- b. Siswa yang terancam putus sekolah karena tidak mampu membayar tagihan biaya sekolah, dan
- c. Memiliki surat keterangan miskin.

Adapun penggunaan dana BOS yang seharusnya menjadi beban siswa sebagaimana Tabel 4.4.

Tabel 4.4 : Perbandingan Pemanfaatan BOS

(dalam rupiah)

URAIAN	SMA NEGERI 20 (Rp)	SMA PGRI 3 (Rp)
Pengadaan Alat Tulis Sekolah	223.096.000	21.058.000
Pengadaan Alat Habis Pakai	33.150.000	23.405.000
Pengadaan Bahan Habis Pakai	57.718.000	66.840.000
Pengadaan Buku Pelajaran/ Buku Penunjang Pelajaran/ Buku Referensi	0	158.640.000
Pemeliharaan Dan Perbaikan Ringan Sarana/Prasarana Sekolah	273.000.000	77.180.000
Langganan Daya Dan Jasa Lainnya	207.599.940	4.200.000
Penyelenggaraan Evaluasi Pembelajaran	83.000.000	53.287.500
Penyelenggaraan kegiatan pembinaan siswa/ekstrakurikuler dan intrakurikuler	250.106.000	78.553.600
Kegiatan Penerimaan Siswa Baru	5.032.000	47.660.000
Pengembangan Profesi Guru dan Tenaga Kependidikan	0	18.800.000
Pengelolaan data individual sekolah berbasis TIKmelalui aplikasi Dapodikmen 2015	4.097.500	4.125.000
Pengembangan <i>Website</i> Sekolah	41.240.000	3.000.000
Biaya Asuransi Keamanan dan Keselamatan Sekolah	0	0
Penyusunan dan Pelaporan	1.560.000	1.250.900

Sumber : diolah

Jumlah pemanfaatan BOS sebagaimana Tabel 4.4 tidak dapat dibedakan lagi antara siswa miskin dan non miskin.

BAB 5 KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

5.1. Kesimpulan

- a. Penyaluran BOS pada SMA Negeri 20 Kota Bandung dan SMA PGRI 3 Kota Bandung mengalami keterlambatan sehingga **tidak sesuai dengan jadwal** yang diatur dalam buku juknis BOS SMA 2015. Hal ini disebabkan adanya kendala dalam pendataan siswa melalui aplikasi dapodikmen yang tidak lancar karena terkait dengan NISN dan keterlambatan pemindahbukuan dari rekening penampungan ke rekening penerima (sekolah). Adapun perbedaan dalam jawaban pada kuesionerpenyaluran BOS pada sekolah SMA Negeri 20 Kota Bandung dikatakan tepat waktu sedangkan pada SMA PGRI 3 Kota Bandung tidak tepat waktu, disebabkan adanya perbedaan persepsi.
- b. Kebijakan keberpihakan kepada siswa miskin **telah dilaksanakan** pada SMA Negeri 20 Kota Bandung dan SMA PGRI 3 Kota Bandung sebagaimana diwajibkan dalam buku juknis BOS SMA tahun 2015. Namun terdapat perbedaan pelaksanaannya pada kedua sekolah tersebut. SMA Negeri 20 membebaskan biaya (gratis) kepada semua siswa miskin sebanyak 154 siswa dengan porsi penerima manfaat 15,67%. Sedangkan SMA PGRI 3 Kota Bandung hanya sebagian kecil saja yang gratis sisanya hanya mendapatkan keringanan biaya bulanan antara 25% s.d. 75% dari iuran sekolah, sehingga porsi penerima manfaat bisa lebih besar yaitu 300 siswa (64,52%). Namun demikian, ada potensi siswa miskin yang “hanya” mendapatkan keringanan biaya bulanan berupa *discount fee*, tidak mampu membayar uang SPP dikemudian hari sehingga memungkinkan *drop-out*.

5.2. Rekomendasi

- a. Perbaikan waktu penyaluran disarankan melalui :
 - i. Percepatan penyelesaian NISN dan sosialisasi aplikasi dapodikmen kepada sekolah lebih diintensifkan agar tidak mengganggu penginputan data, mengingat data siswa menjadi dasar perhitungan penyaluran BOS SMA.
 - ii. Percepatan penerbitan Surat Perintah Pemindahbukuan (SPPb) oleh Direktorat Pembinaan SMA ke rekening sekolah setelah dana BOS masuk ke rekening penampungan

- b. Mengingat kajian ini memiliki keterbatasan, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut dengan lingkup yang lebih luas terkait:
- i. Ketepatan waktu penyaluran BOS pada:
 - Sekolah-sekolah lain;
 - Implikasi keterlambatan
 - Bagaimana dengan sekolah yang lancar/ tepat waktu menerima BOS
 - ii. Keberpihakan BOS pada siswa miskin :
 - Lingkup kota Bandung;
 - Bagaimana proporsi pada SMA Negeri Kota Bandung

DAFTAR PUSTAKA

- Kemdikbud, 2014. *Permendikbud Nomor 161 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2015*.
- Kemdikbud, 2015. *Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Sekolah Menengah Atas 2015*.
- Kemdikbud, 2014. *Grand Design Pendidikan Menengah Universal (PMU) Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) 2014 Dinas Pendidikan Kota Bandung, Bandung, 2015*
- Lexy Maleong, *Metodologi penelitian kualitatif*, Bandung, 2003.
- <http://bandungkota.bps.go.id>
- <http://eprints.walisongo.ac.id>.
- <https://ppdbkotabandung.wordpress.com/passing-grade-2/passing-grade-2015/>
- <http://referensi.data.kemdikbud.go.id/>
- <http://www.id.wikipedia.go.id>